



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 48 Tahun 2014  
TANGGAL : 28 Mei 2014

**MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA  
2011 - 2025**

**BAB 1: INDONESIA MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**

**A. Pendahuluan**

Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih dari enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. Kemajuan ekonomi juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2011, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 0,39 ke 0,61.

Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global. Berdasarkan data IMF, pada tahun 2011 peringkat ekonomi Indonesia meningkat ke posisi 16 dunia. Pengakuan dunia terhadap perkembangan positif perekonomian Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya rating Indonesia menjadi *Investment Grade* pada akhir tahun 2011 setelah penantian 14 tahun. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. Hal ini tercermin dengan perbaikan peringkat hutang Indonesia di saat peringkat negara-negara lain justru mengalami penurunan. Disamping itu, Goldman Sachs telah memasukkan Indonesia kedalam kelompok negara baru bernama MIST (Mexico, Indonesia, South Korea, dan Turki) yang dianggap sebagai alternatif tujuan investasi yang menjanjikan selain Brazil, Rusia, India, dan China (BRIC).

Keberhasilan Indonesia dalam perekonomian tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang terus meningkat. Oleh karena itu, menyadari pentingnya pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam dan lingkungan untuk kebutuhan generasi mendatang, maka prinsip-prinsip keberlanjutan terintegrasi dalam kebijakan nasional dan dokumen perencanaan. Sebagaimana yang dicanangkan dalam pilar pembangunan Indonesia yaitu *Pro Growth, Pro Poor, Pro Jobs*, dan juga *Pro Environment*.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Di tingkat global, peran Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan juga ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam KTT 20+ di Rio Brazil 2012 yang menyepakati dokumen *The Future We Want* yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Namun demikian, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Disatu sisi, kegiatan percepatan pembangunan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, jika sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik dan mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan, maka akan berdampak pada timbulnya resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunnya daya dukung lingkungan hidup.

Dalam konteks inilah Presiden Republik Indonesia menyadari perlunya penyusunan MP3EI dengan memperhatikan aspek berkelanjutan untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Percepatan dan perluasan pembangunan di Koridor Ekonomi akan dapat dicapai jika modal dasar pembangunan berupa sumber daya dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya dan pemanfaatannya mengacu pada kemampuan daya dukung lingkungan. Maka, melalui percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi berbasis berkelanjutan ini, perwujudan kualitas pembangunan manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa.

## **B. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia**

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah **“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”**. Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) Sumber Daya Alam (SDA), geografis wilayah, dan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antarkawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

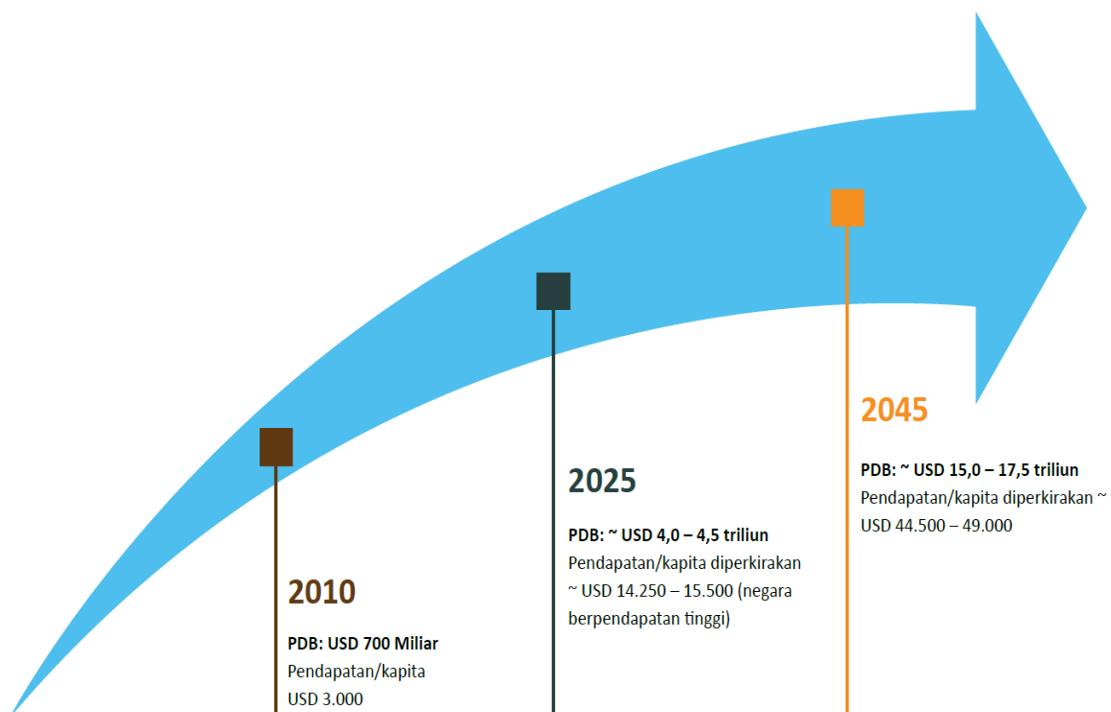
- 3 -

3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju *innovation-driven economy*.

Visi misi pembangunan ekonomi Indonesia tersebut telah sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyerasikan sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan dengan berlandas pada tiga pilar utama yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan kelestarian perlindungan lingkungan. Sejalan dengan itu, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, melalui langkah MP3EI akan mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia tahun 2025 dan delapan besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menempatkan Indonesia sebagai negara maju tersebut maka ditargetkan pendapatan per kapita berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 Triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025.

Gambar 1.1  
Aspirasi Pencapaian PDB Indonesia



Selain kombinasi pertumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi, sasaran dalam pembangunan berkelanjutan juga mencakup target penurunan tingkat kemiskinan hingga 8–10 persen pada periode tahun 2015 dan 4–5 persen pada tahun 2025. Disamping itu, dalam memastikan kesejahteraan sosial, target pembangunan juga meliputi penurunan angka pengangguran, dan penurunan ketimpangan regional baik dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sekolah, dan kesehatan.

Program-program pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial tersebut telah termuat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan juga dilaksanakan program-program terkait peningkatan kualitas lingkungan, diantaranya penurunan emisi gas rumah kaca, pemenuhan kebutuhan air, peningkatan kualitas tanah, pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai daya dukung lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Kebijakan terkait penurunan emisi gas rumah kaca sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang memuat target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen melalui dana dalam negeri dan 41 persen melalui dana bantuan luar negeri.

Gambar 1.2

MP3EI yang Berkelanjutan

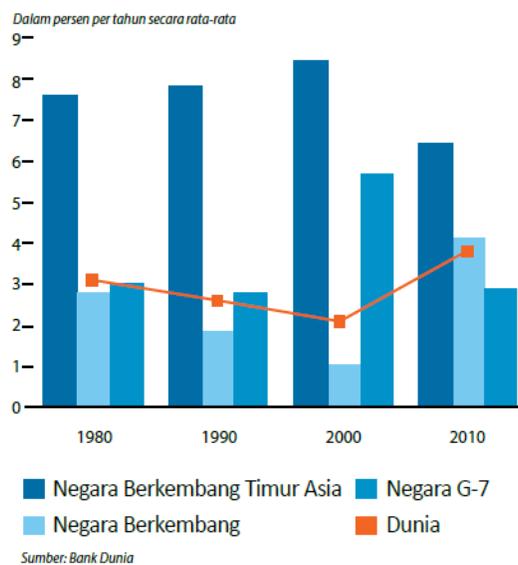


### C. Posisi Indonesia Dalam Dinamika Regional dan Global

Sebagai pusat gravitasi perekonomian global, Kawasan Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) memiliki jumlah penduduk sekitar 50 persen dari penduduk dunia. Cina memiliki sekitar 1,3 miliar penduduk, sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar orang, dan ASEAN dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa. Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di tengah-tengah Kawasan Timur Asia yang mempunyai potensi ekonomi sangat besar.

Dalam aspek perdagangan global, dewasa ini perdagangan *South to South*, termasuk transaksi antara India-Cina-Indonesia, menunjukkan peningkatan yang cepat. Sejak 2008, pertumbuhan ekspor Negara berkembang yang didorong oleh permintaan negara berkembang lainnya meningkat sangat signifikan (kontribusinya mencapai 54 persen). Hal ini berbeda jauh dengan kondisi tahun 1998 yang kontribusinya hanya 12 persen. Pertumbuhan yang kuat dari Cina, baik ekspor maupun impor memberikan dampak yang sangat penting bagi perkembangan perdagangan regional dan global. Impor Cina meningkat tajam selama dan setelah krisis ekonomi global 2008. Di samping itu, konsumsi Cina yang besar dapat menyerap ekspor yang besar dari negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia.

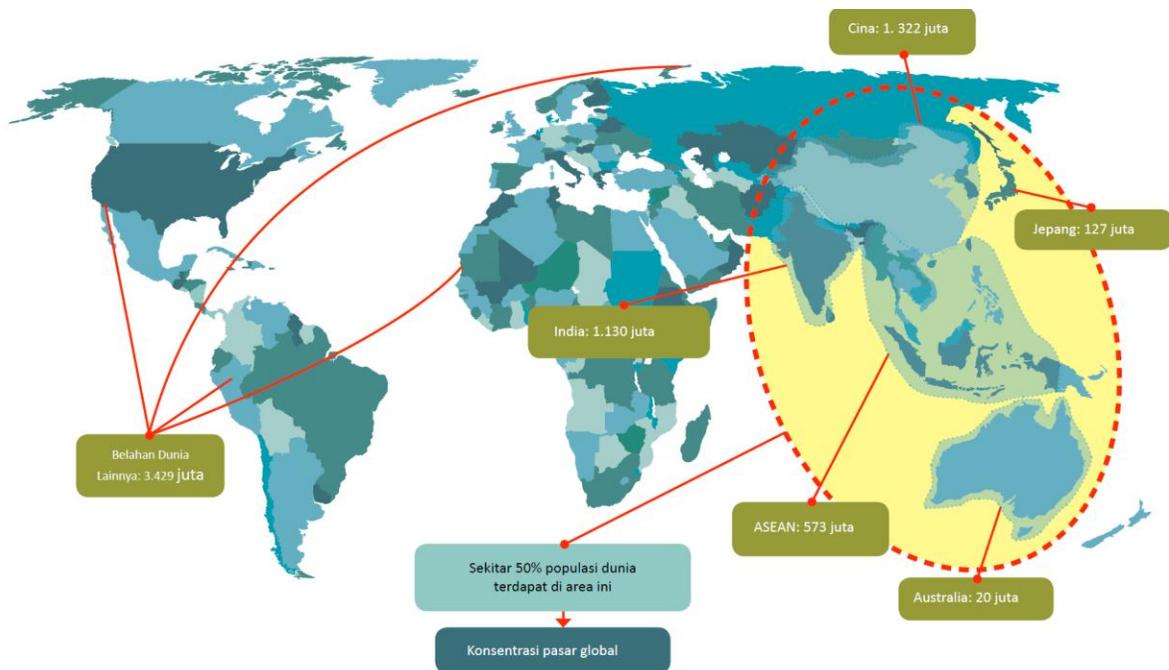
Gambar 1.3  
Pertumbuhan Ekonomi Global untuk Tiap Dekade



Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas kawasan terbesar, penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama negara-negara di Asia Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN dan terdapatnya *Asia Pacific Economic Community* (APEC) mengharuskan Indonesia meningkatkan daya saingnya guna mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Oleh karena itu, percepatan transformasi ekonomi yang dirumuskan dalam MP3EI ini menjadi sangat penting dalam rangka memberikan daya dorong dan daya angkat bagi daya saing Indonesia.

Dengan melihat dinamika global yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada di Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dalam kerangka MP3EI, Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global.

Gambar 1.4  
Pemetaan Populasi Asia dan Dunia



## D. Potensi dan Tantangan Indonesia

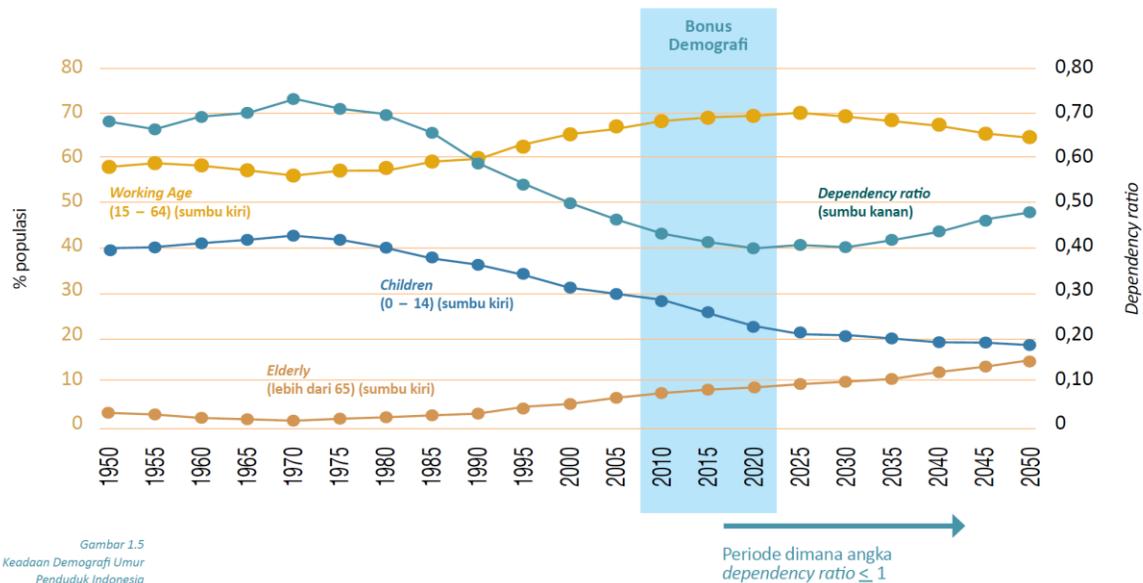
Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia didukung oleh potensi demografi, kekayaan sumber daya alam serta posisi geografis Indonesia.

### 1. Potensi Indonesia

#### a. Penduduk dan Sumber Daya Manusia

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia. Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial, sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa. Berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI), posisi Indonesia terus mengalami peningkatan dalam periode 2000–2013 yaitu dari posisi 55 ke 38.

Gambar 1.5  
Keadaan Demografi Umur Penduduk Indonesia



Gambar 1.5  
Keadaan Demografi Umur  
Penduduk Indonesia

Indonesia tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produktif. Pada kurun waktu 2020–2030, penurunan indeks (*ratio*) ketergantungan Indonesia (yang sudah berlangsung sejak tahun 1970) akan mencapai angka terendah. Implikasi penting dari kondisi ini adalah semakin pentingnya penyediaan lapangan kerja agar perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal besarnya porsi penduduk usia produktif. Upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja di Indonesia terus meningkat terlihat dari menurunnya angka pengangguran dari tahun 2005 sebesar 11,24 persen menjadi 6,58 persen pada tahun 2011 (BPS, 2012). Lebih penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, produktivitas perekonomian negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, dimana hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan percepatan maupun perluasan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data dalam *Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2012* yang dikeluarkan UNESCO, indeks pembangunan pendidikan atau *Education Development Index (EDI)* Indonesia berada diposisi menengah yaitu 64 dengan nilai 0,938, dimana untuk mencapai klasifikasi EDI tinggi Indonesia perlu mencapai nilai 0,950.

## b. Sumber Daya Alam

Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

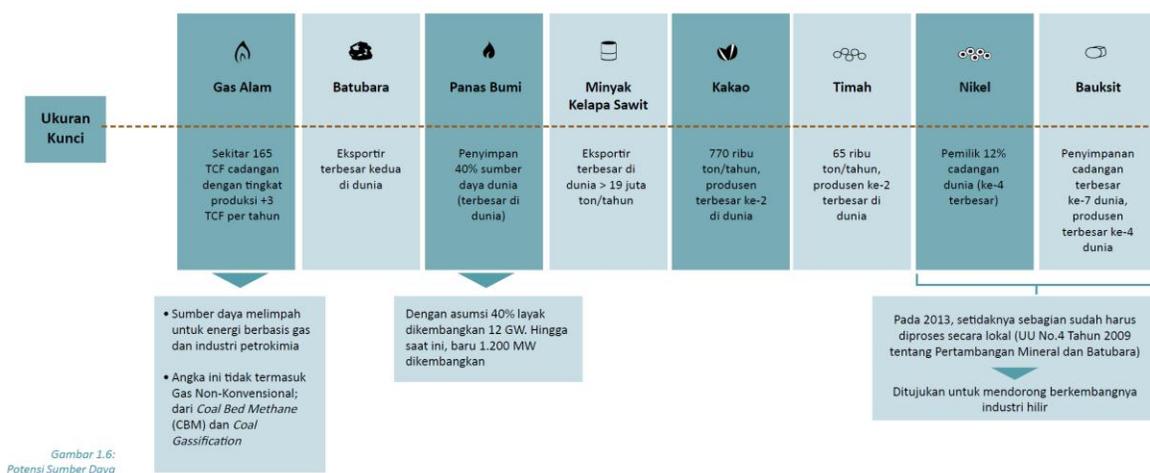
- 8 -

Sampai tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas, antara lain kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), kakao (produsen terbesar kedua di dunia), timah (produsen terbesar kedua di dunia), nikel (cadangan terbesar ke empat di dunia) dan bauksit (cadangan terbesar ke tujuh di dunia) serta komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, tembaga, karet dan perikanan. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti misalnya batubara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung industri andalan seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi dan makanan-minuman. Potensi sumber daya air yang dimiliki Indonesia sebesar 2,8 triliun m<sup>3</sup> atau sekitar 5 persen dari persediaan air dunia. Potensi air tersebut tersebar dalam 7.956 sungai dan 521 danau yang ada di berbagai wilayah Indonesia dengan ketersediaan air secara mantap sekitar 700 miliar m<sup>3</sup> setiap tahun (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011).

Indonesia juga merupakan negara *megabiodiversity* dimana keanekaragaman hayati sebagai modal utama pembangunan, sumber pangan, energi, biofarmaka dan bahan baku lainnya. Potensi ini semakin tinggi dengan adanya Protokol Nagoya, yang merupakan kesepakatan internasional untuk mengatur pemberian akses dan keuntungan secara adil atas pemanfaatan keanekaragaman hayati berupa sumber daya generik serta pengetahuan tradisionalnya. Di tingkat global, Indonesia berada pada posisi 3 besar dari 10 negara yang memiliki keanekaragaman tertinggi di dunia, selain Brazil dan Zaire (Prosiding Seminar Nasional “*Green Regional Development Melalui Pengembangan Inovasi Teknologi Mendukung Terwujudnya MP3EI*, 2012).

Gambar 1.6

### Potensi Sumber Daya Alam Indonesia



Gambar 1.6:  
Potensi Sumber Daya  
Alam Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

### **c. Letak Geografis**

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Luas perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> atau 70 persen dari total wilayah Indonesia yang panjangnya sekitar 5.200 km dan lebar 1.870 km. Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang yaitu 95.181 km. Selain potensi di atas, Indonesia juga dilalui 3 alur pelayaran internasional dan laut yang menjadi sarana transportasi efektif antar pulau. Secara sosial, sekitar 110 juta jiwa atau 60 persen berada dikawasan pesisir dengan radius 50 km dari garis pantai. Dari segi ekonomi, setidaknya 60 persen cekungan minyak berada di laut serta potensi ikan 6,7 juta ton pertahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu *Sea Lane of Communication* (SLoC), yaitu Selat Malaka, dimana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global (lihat Gambar 1.7).

Berdasarkan data United Nations Environmental Programme (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah perairan *Large Marine Ecosystem* (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas, dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu: LME 34 – Teluk Bengala; LME 36- Laut Cina Selatan; LME 37- Sulu Celebes; LME 38-Laut-Laut Indonesia; LME 39-Arafura-Gulf Carpentaria; LME 45–Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industri perikanan tangkap sangat besar.

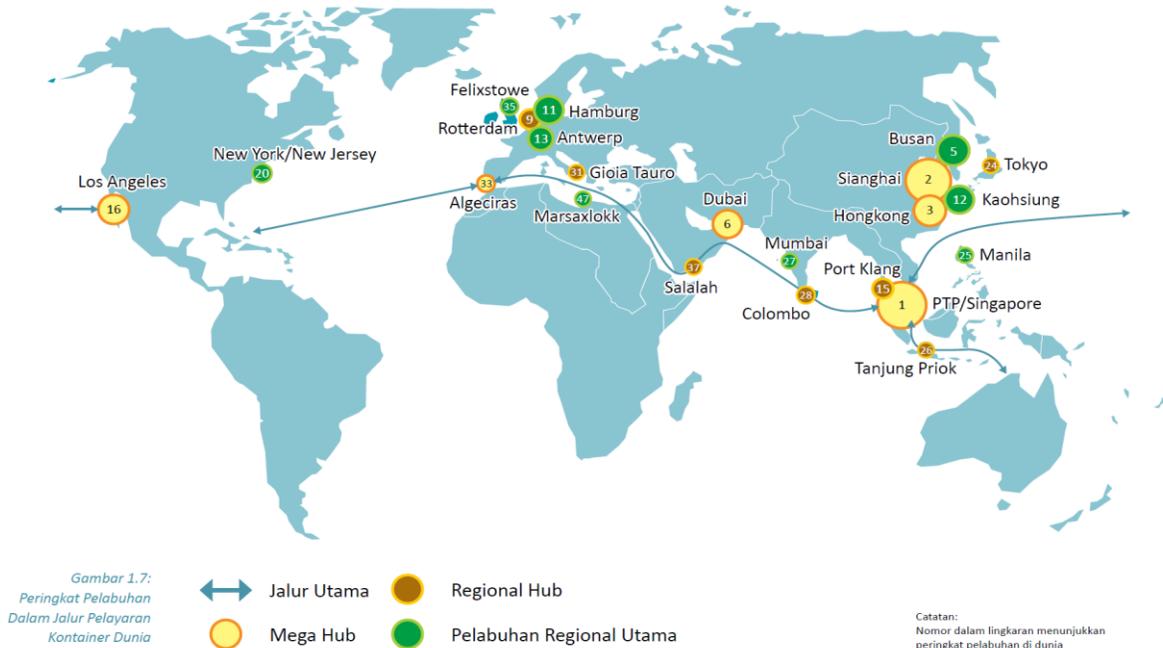


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Gambar 1.7

### Peringkat Pelabuhan Dalam Jalur Pelayaran Kontainer Dunia



Dengan potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah, saat ini perikanan berkontribusi sekitar 22 persen dari total PDRB sub sektor perikanan pangan dimana sekitar 20 persen dari aktivitas perikanan tersebut merupakan perikanan tangkap dan sisanya adalah perikanan budidaya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Selain itu, Indonesia merupakan produsen makanan laut terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan produksi makanan laut mencapai 7 persen per tahun. Dengan luas lautan dan kekayaan bahari yang ada di Indonesia, potensi pendapatan sektor maritim per tahun bisa mencapai tujuh kali dari pendapatan negara saat ini. Diperkirakan dengan potensi kemaritiman yang dimiliki, dan dengan pengelolaan sumber daya kelautan yang baik dari sektor perikanan, pertambangan, pariwisata bahari, industri maritim, dan perhubungan laut, maka setiap tahunnya akan menghasilkan IDR 7.400 triliun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

## 2. Tantangan Indonesia

Walaupun potensi ini merupakan keunggulan Indonesia, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Harus pula dipahami bahwa upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat. Upaya tersebut harus dimulai melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menuju Indonesia yang lebih merata.

Terkait hal diatas, pemanfaatan sumber daya alam dapat dikatakan sebagai tulang punggung pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Di satu sisi akan berdampak positif bagi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Namun, disisi lain hal tersebut dapat berakibat pada kerusakan lingkungan dan berkurangnya cadangan sumber daya alam untuk generasi endatang jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dengan meningkatkan inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan perlu diciptakan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Tantangan lain dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya.

Kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan Indonesia. Saat ini sekitar 50 persen tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya sekitar 8 persen yang berpendidikan diploma/sarjana. Kualitas sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kualitas sarana pendidikan, kesehatan, dan akses ke infrastruktur dasar.

Indonesia sedang menghadapi urbanisasi yang sangat cepat. Jika pada tahun 2010 sebanyak 53 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, maka BPS memprediksi bahwa pada tahun 2025 penduduk di kawasan perkotaan akan mencapai 65 persen. Implikasi langsung yang harus diantisipasi akibat urbanisasi adalah terjadinya peningkatan pada pola pergerakan, berubahnya pola konsumsi dan struktur produksi yang berdampak pada struktur ketenagakerjaan, meningkatnya konflik penggunaan lahan, dan meningkatnya kebutuhan dukungan infrastruktur yang handal untuk mendukung distribusi barang dan jasa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

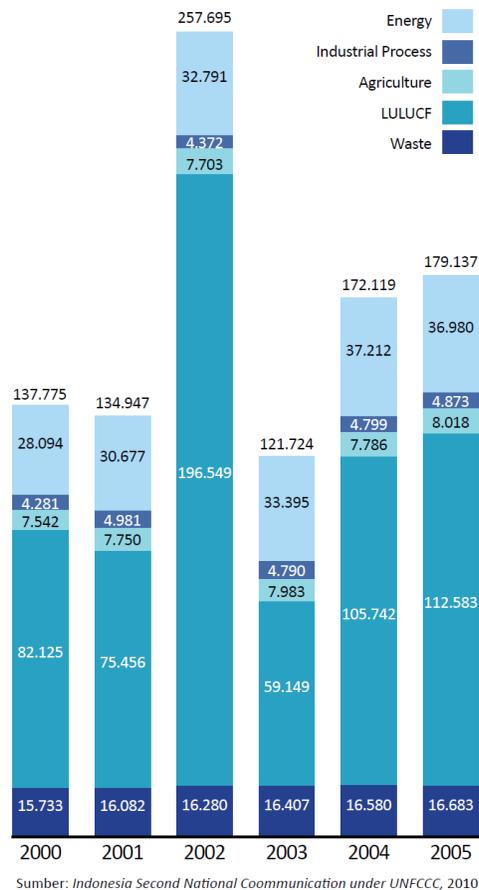
Kesepakatan perdagangan bebas di tingkat regional seperti *Asean Economic Community* dapat menjadi peluang sekaligus tantangan besar yang dihadapi Indonesia terutama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan peran UMKM yang penting dalam perekonomian Indonesia yaitu lebih dari 90 persen jumlah usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM dan menyerap jumlah tenaga kerja yang tinggi serta menurunkan angka kemiskinan. Namun kondisinya saat ini, daya saing bagi pelaku usahanya masih rendah dan akses terhadap modal serta pemasarannya masih sangat terbatas. Sehingga diperlukan peningkatan potensi UMKM yang kompetitif, pembangunan infrastruktur dan institusi hingga penyiapan sumber daya yang handal dan terampil dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas. Oleh karena itu, dengan dilaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan industri besar melainkan dapat pula berdampak positif bagi peningkatan UMKM.

Walaupun potensi ini merupakan keunggulan Indonesia, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim global. Beberapa indikator perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan manusia adalah: kenaikan permukaan air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan frekuensi perubahan iklim yang ekstrem. Demikian pula, pengaruh kombinasi peningkatan suhu rata-rata wilayah, tingkat presipitasi wilayah, intensitas kemarau/banjir, dan akses ke air bersih, menjadi tantangan bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, tantangan besar yang dihadapi Indonesia dibidang lingkungan ialah meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berdampak pada perubahan iklim ekstrem. Berdasarkan studi dari World Bank menyebutkan bahwa, dengan memasukkan sektor perubahan lahan dan hutan/LULUCF (*Land Use and Land Use Change Forestry*) maka Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penyumbang emisi GRK setelah Amerika dan Cina. Pada gambar 1.8 menunjukkan bahwa sekitar 62 persen dari total emisi GRK di Indonesia pada tahun 2005 bersumber dari perubahan lahan dan hutan yang termasuk didalamnya kebakaran dan kekeringan lahan gambut, dan deforestasi. Pembatasan penggunaan lahan dan hutan untuk beberapa kegiatan ekonomi perlu dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK dan mengurangi kerusakan lingkungan. Namun dilain pihak, sektor ini mempunyai peran yang cukup penting dalam perekonomian nasional yaitu memberi sumbangan yang besar terhadap lapangan kerja, yang diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 6 persen pada tahun 2011 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011).

Gambar 1.8  
Peringkat Pelabuhan Dalam Jalur Pelayaran Kontainer Dunia



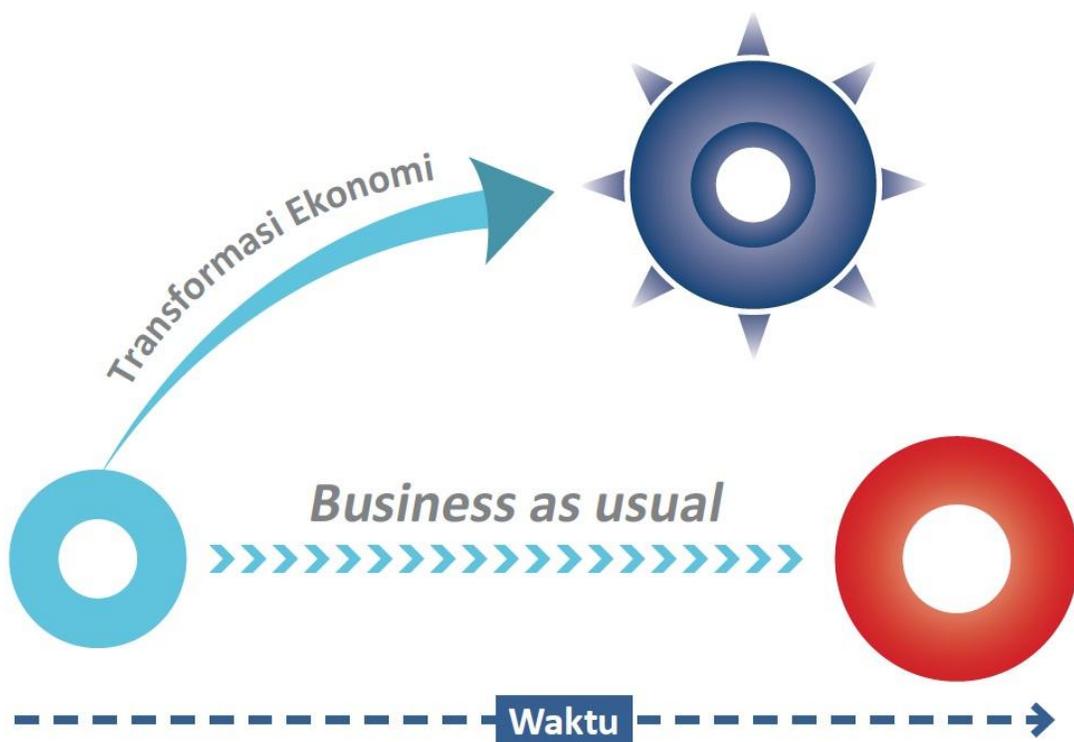
Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim global. Beberapa indikator perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan manusia adalah: kenaikan permukaan air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan frekuensi perubahan iklim yang ekstrem. Demikian pula, pengaruh kombinasi peningkatan suhu rata-rata wilayah, tingkat presipitasi wilayah, intensitas kemarau/banjir, dan akses ke air bersih, menjadi tantangan bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pada sektor perikanan, adanya perubahan iklim ekstrem berdampak pada menurunnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan sebagai akibat tingginya curah hujan dan gelombang besar. Perubahan iklim juga telah dirasakan dampaknya pada sektor pertanian, yang kemudian dapat berpengaruh pada ketahanan pangan, kesehatan manusia, permukiman dan lingkungan, termasuk sumber daya air dan keanekaragaman hayati. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mewujudkan percepatan dan perluasan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

### **E. Percepatan dan Perluasan Transformasi Ekonomi melalui *Not Business As Usual***

Dengan seluruh potensi dan tantangan yang telah diuraikan di atas, Indonesia membutuhkan percepatan dan perluasan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (*mindset*) yang didasari oleh semangat **“*Not Business As Usual*”**.

Gambar 1.9

Ilustrasi Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia



Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat *Indonesia Incorporated*). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik serta asing.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pemahaman tersebut harus direfleksikan dalam kebijakan Pemerintah. Regulasi yang ada seharusnya dapat mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal untuk membangun berbagai macam industri dan infrastruktur yang diperlukan. Karena itu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha.

Semangat *Not Business As Usual* juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau *Public-Private Partnership* (PPP).

Namun demikian, untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun *linkage* semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Gambar 1.10  
22 Kegiatan Ekonomi Utama



Pelaksanaan kegiatan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada 22 Kegiatan Ekonomi perlu memperhatikan daya dukung lingkungan dengan menerapkan inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Penerapan teknologi hijau yang rendah karbon tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan pemanfaatan sumber daya alam, namun juga berdampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup serta tercapainya pertumbuhan ekonomi tanpa berdampak buruk bagi lingkungan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

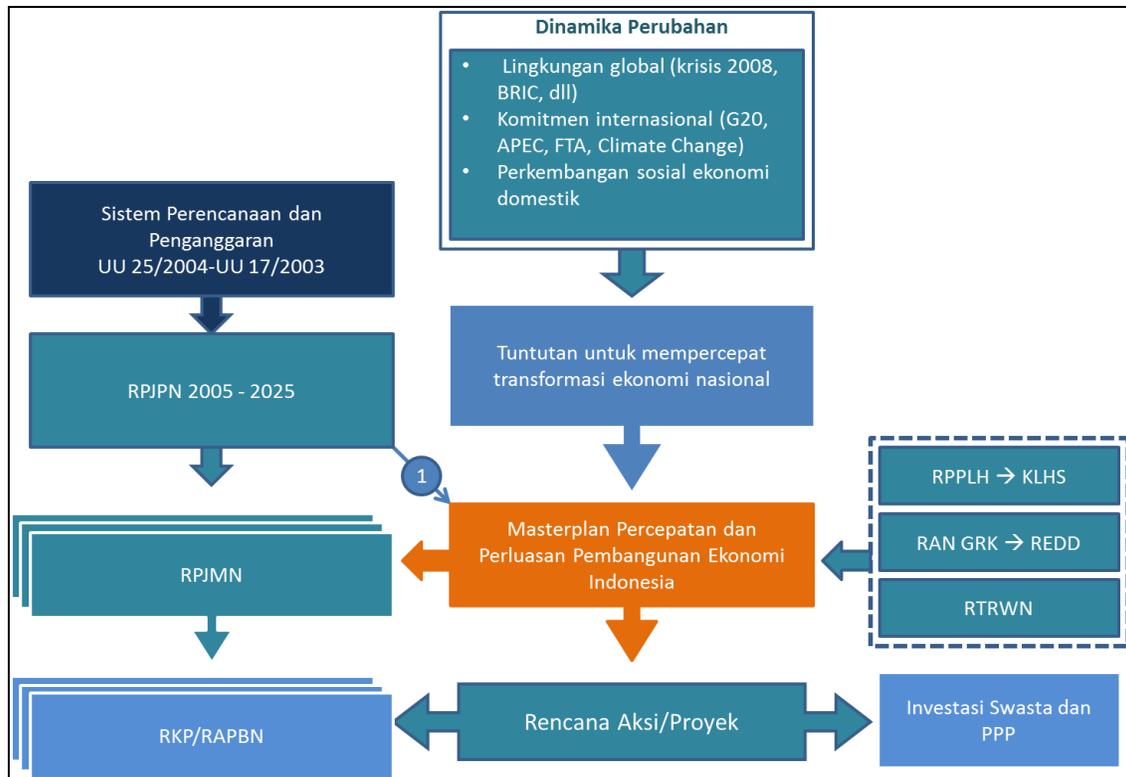
- 17 -

#### **F. MP3EI Merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan dokumen perencanaan, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari RPJPN, MP3EI disusun sebagai upaya adaptasi, integrasi, dan akselerasi pembangunan yang didorong oleh kondisi dinamika perubahan yang ada, termasuk perubahan kondisi lingkungan global, seperti krisis moneter 2008, dan perkembangan *new emerging economies countries* BRIC.

MP3EI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009) dan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RANGRK). Terkait hal tersebut, maka pelaksanaan program MP3EI perlu memastikan penerapan prinsip berkelanjutan serta memperhatikan pemanfaatan, pencadangan, pengendalian, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengamanatkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) wajib untuk dokumen rencana tata ruang, RPJP dan RPJM, RKP, termasuk juga MP3EI yang berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian, investasi di koridor MP3EI selain memiliki nilai pengganda ekonomi juga sebagai upaya mendukung kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pengembangan industri rendah karbon.

Gambar 1.11  
Posisi MP3EI di dalam Rencana Pembangunan Pemerintah



### G. Kerangka Desain MP3EI

Berdasarkan berbagai faktor di atas, maka kerangka desain dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dirumuskan sebagaimana pada Gambar 1.12 berikut ini. Secara lebih detail, setiap bagian dari strategi utama MP3EI akan diuraikan lebih lanjut pada bab selanjutnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Gambar 1.12  
Kerangka Desain Pendekatan Masterplan P3EI

